



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA DENPASAR
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 245290

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.802.000.000**

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA GIANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 218 m2 di KAB / KOTA GIANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 654.000.000
4. Tanah Seluas 82 m2 di KAB / KOTA GIANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 246.000.000
5. Tanah Seluas 1100 m2 di KAB / KOTA GIANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA GIANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
7. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah Seluas 260 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
9. Tanah Seluas 6270 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 627.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 910.000.000**

1. MOBIL, NISSAN NAVARA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000



2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
300.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
4. MOBIL, MAZDA MINIBUS CX3 Tahun 2020, HADIAH Rp.
300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	190.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.761.787.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.253.610.131
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	13.917.897.131

III. HUTANG	Rp.	----
-------------	-----	------

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	13.917.897.131
-----------------------------------	-----	----------------

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.